

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 pada tanggal 23 september 2025 untuk ditetapkan menjadi undang – undang. Untuk pertama kali sejak desentralisasi fiskal dimulai tahun 2001, transfer dana ke daerah dan dana desa mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp. 227 triliun atau 24.68% dari Rp919,9 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp692,9 triliun pada tahun 2026. Sementara itu sebagian besar pemerintahan daerah mempunyai ketergantungan pendanaannya dari pendapatan transfer dana daerah (ANTARA News, 2025).

Kebijakan otonomi daerah memberikan keleluasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan serta pelaksanaan keuangan daerahnya sendiri. Dalam hal ini, kapasitas daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur utama kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah tidak sekadar dituntut untuk meningkatkan pendapatan, melainkan juga diharapkan dapat menggunakan anggaran secara efisien dan efektif, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal (Febrianty et al., 2023).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman karakteristik wilayah. Perbedaan dalam aspek geografis, potensi ekonomi, dan akses infrastruktur antar kabupaten mengakibatkan kapasitas fiskal setiap daerah juga berbeda. Ketimpangan tersebut dapat berdampak pada kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD, penyediaan belanja modal, serta pemenuhan kebutuhan belanja barang untuk layanan public (Direktorat Jenderal Perbendaharaan., 2020).

Pada data APBD Sumatera Barat tahun 2024, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 28.235,77 miliar dengan realisasi Rp. 20.294,82 miliar atau 71,88%, sedangkan PAD sebesar Rp. 6.141,96 miliar dengan realisasi Rp. 4.002,33 miliar atau 65,16 %. Di sisi belanja, belanja daerah tercatat sebesar Rp. 29.765,06 miliar dengan realisasi Rp. 17.522,07 miliar, sementara belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp. 8.153,50 miliar dengan realisasi Rp. 4.286,00 miliar dan belanja modal sebesar Rp. 3.310,43 miliar dengan realisasi Rp. 1.173,74 miliar. Data ini menunjukkan bahwa porsi PAD dan belanja modal masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Periode 2020–2024 merupakan masa pandemi covid-19 dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pada periode tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal dalam mempertahankan stabilitas pendapatan daerah sekaligus menyesuaikan kembali pengelolaan belanja agar tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap pertumbuhan realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah, porsi belanja modal terhadap APBD, dan porsi belanja barang terhadap APBD menjadi relevan untuk menggambarkan kinerja keuangan 12 kabupaten di Sumatera Barat secara lebih komprehensif (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024).

PAD memiliki peranan besar sebagai sumber pendanaan daerah yang menentukan kemandirian pemerintahan daerah. Salah satu indikator kemandirian fiskal pemda adalah porsi PAD terhadap total pendapatan semakin tinggi porsi PAD terhadap total pendapatan semakin tinggi kemandirian suatu pemda. Sebaliknya semakin rendah porsi PAD terhadap total pendapatan semakin tinggi ketergantungan (Putra & Hidayat, 2016).

Kualitas belanja suatu daerah diukur dari porsi belanja modal terhadap total belanja dan porsi belanja barang terhadap total belanja. Semakin besar belanja

APBD yang dialokasikan untuk belanja modal dan belanja barang semakin besar belanja APBD menghasilkan efek-efek berganda (*multiflayer*) terhadap perekonomian di daerah.

Berdasarkan Penelitian (Chairaman, 2024) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada sejumlah kabupaten/kota masih termasuk rendah. Hal ini disebabkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kecil. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pengelolaan belanja daerah, terutama belanja modal dan belanja operasi, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian (Novitasari et al., 2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui pertumbuhan PAD, rasio keserasian belanja, dan efisiensi belanja daerah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih lebih dominan mengalokasikan APBD pada belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga tingkat keserasian belanja daerah belum optimal. Selain itu, (Harahap, 2024) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum cukup baik, tetapi pada beberapa daerah selama periode 2020–2022 masih terdapat ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan analisis terhadap pertumbuhan realisasi PAD, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah, porsi belanja modal terhadap APBD, serta porsi belanja barang terhadap APBD untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020–2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kita disajikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024?
2. Bagaimanakah tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024?
3. Bagaimanakah rasio belanja modal pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024?
4. Bagaimanakah rasio belanja barang pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024?
5. Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 berdasarkan empat indikator tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024.
2. Untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024.
3. Untuk menganalisis rasio belanja modal pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024.

4. Untuk menganalisis rasio belanja barang pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 berdasarkan empat indikator tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik serta pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan belanja barang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah di 12 kabupaten Sumatera Barat tentang kondisi kinerja keuangannya selama periode 2020–2024. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan PAD, memaksimalkan alokasi pengeluaran, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

3. Manfaat Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan mandiri. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendukung pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran secara lebih tepat dan sesuai kebutuhan, khususnya dalam mendorong peningkatan belanja produktif serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Manfaat Penelitian; dan (e) Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini peneliti menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Selain itu, dibahas pula hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber referensi dan untuk memperluas pemahaman peneliti terhadap topik yang diteliti. Pembahasan pada bagian ini kemudian diakhiri dengan penyajian kerangka berpikir sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan metode penelitian yang digunakan yang meliputi jenis penelitian, sumber data, Subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, disertai dengan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

